

Nama : Nurul Mutmainah
Npm : 2252011080
Matakul : UTS Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Hukum Bisnis merupakan sistem ~~bisnis~~ hukum Perusahaan, bagaimana menurut anda tentang Pernyataan berikut
2. Bentuk Perusahaan yang memperoleh
 - a. Perseroan terbatas oleh ...
 - b. Koperasi oleh ...
 - c. Perum dan Persero oleh ...
 - d. Yayasan oleh ...
3. Pembubaran pada pr harus didahului dan apa dan oleh siapa
4. Tuliskan organ dan kedudukan dari pada pr dan tuliskan Perbedaan antar pr dengan PT. Tbk
5. Apakah yang dimaksud dengan legalitas Perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh Perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas.
- 6.

Jawaban :

1. Menurut saya, benar jika apa adanya bahwa hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. melihat dari cakupannya, hukum bisnis mencakup segala perihal tata cara dan pelaksanaan kegiatan usaha, dan juga hukum bisnis merupakan sistem hukum yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan adil, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2 - A. PT di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) setelah melalui proses pembuatan akta pendirian PT oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
B. Koperasi di sahkan oleh menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan hukum.
C. Perum dan Persero di sahkan oleh menteri hukum ~~dan HAM~~ dan memperoleh status ~~hukum~~ badan hukum
d. Yayasan mendapat pengesahan oleh ~~menteri~~ Kepala Kantor departemen kehakiman dan hak asasi manusia atas nama menteri.

3. Pembubaran pada PT harus dilalui dengan melakukan likuidasi terlebih dahulu yang mana proses ini dilakukan oleh likuidator. lalu nantinya di sahkan oleh menteri Kemenkumham dengan mencatat berakhirnya ~~status~~ status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan.

4. Organ dan Kedudukan PT :

- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah organ PT yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi / dewan komisaris dan batas yang ditentukan dalam UU / anggaran dasar.
- Direksi adlh organ PT yang berwenang & bertanggung jawab penuh atas Pengurusan PT
- Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum sesuai dan anggaran PT.
- Perbedaan PT dan PT. TBK : PT hanya tunduk pd UUPR dan UU Cipta Kerja tetapi juga dengan UU No. 8 tahun 1998 tentang Pasar Modal.
PT TBK yang tidak melakukan Penawaran Sahamnya kepada Publik sehingga hanya tunduk pada UUPR dan UU Cipta Kerja.

5. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan UU yang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah

→ 5 dokumen yang harus dimiliki :

1. NPWP Badan Usaha
2. AKTA Pendirian Perusahaan
3. SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan
4. SKDP Surat Keterangan Domisili Perusahaan
5. TDP Tanda Daftar Perusahaan / (NIB) Nomor Induk Berusaha

→ Apabila Suatu Perusahaan tidak memiliki legalitas maka ia tidak memiliki perlindungan hukum. Yang mana perlindungan hukum sangat penting dimiliki suatu perusahaan karena ada banyak risiko di depan yang memungkinkan akan merugikan Perusahaan. Dan juga legalitas suatu perusahaan akan mendapat kepercayaan dari orang, jadi jika memiliki legalitas maka akan membuat orang tidak percaya pada perusahaan tersebut.